



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG	: EKSEKUTIF		
LEMBAGA	: KEMENTERIAN PERTANIAN		
UNIT KERJA	: DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
I. DATA PRIBADI			
1. Nama	: YESSI LATIPAH		
2. Jabatan	: PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA		
3. NHK	: 402728		
II. DATA HARTA			
A. TANAH DAN BANGUNAN		Rp.	500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/126 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000			
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN		Rp.	92.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000			
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000			
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000			
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	27.000.000
D. SURAT BERHARGA		Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	16.295.759
F. HARTA LAINNYA		Rp.	----
Sub Total		Rp.	635.295.759
III. HUTANG		Rp.	138.229.200
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	497.066.559

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.